

PENGALAMAN KAMI

Pusat Pengendali Operasi Daerah

Pelaku Utama Peringatan Dini Tsunami di Indonesia

LATAR BELAKANG

Lima menit setelah gempa, *National Tsunami Warning Center* (NTWC) mengirimkan informasi gempa atau peringatan tsunami kepada stasiun TV dan radio serta otoritas daerah. Setelah menerima peringatan, kewenangan berada pada otoritas daerah untuk mengeluarkan arahan evakuasi. Pada saat ini, peran Pusat Pengendali Operasi (PUSDALOPS) di daerah dimulai.

Tsunami lokal bisa melanda pantai dalam waktu sangat cepat, sementara evakuasi membutuhkan waktu sehingga otoritas daerah perlu meresponnya dengan cepat dan tepat. Masyarakat membutuhkan arahan yang jelas segera setelah gempa terjadi. Untuk dapat mengakses informasi dari NTWC, mengambil keputusan, dan mengeluarkan arahan evakuasi kepada masyarakat dengan cepat, otoritas daerah memerlukan *Standard Operation Procedure* (SOP). PUSDALOPS dapat menjalankan ketiga fungsi tersebut atas nama otoritas daerah, jika persyaratan tertentu yang dapat dibaca pada uraian di bawah telah terpenuhi.

PENGALAMAN DI JAWA, PADANG, DAN BALI

Proyek mendukung PUSDALOPS sejak 2007 melalui kerja sama dengan mitra di daerah percontohan untuk melakukan kajian kebutuhan peringatan dini tsunami secara umum dan PUSDALOPS secara khusus. Dukungan proyek lainnya diberikan dalam bentuk bantuan peralatan komunikasi. SOP PUSDALOPS dibuat dengan mengacu pada skema peringatan *Indonesian Tsunami Early Warning System* (InaTEWS).

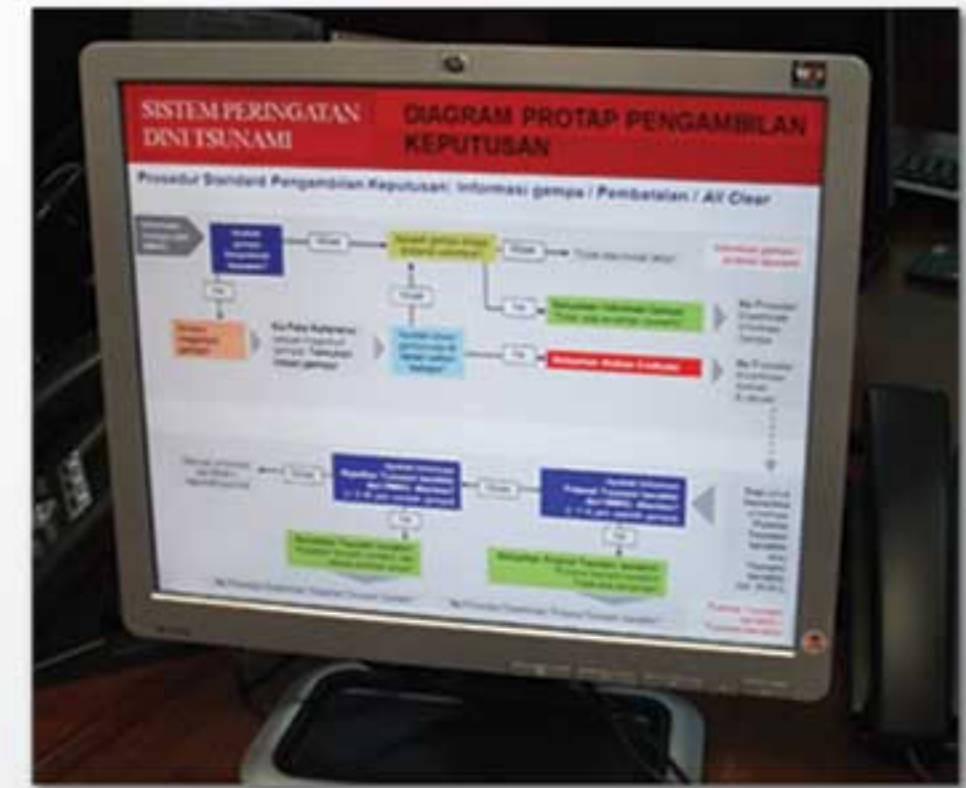
Kabupaten Bantul (DIY) telah melakukan pengujian SOP PUSDALOPS, rencana evakuasi, dan kemampuan masyarakat merespon peringatan, melalui geladi tsunami tahun 2008. Geladi ini melibatkan beberapa lembaga terkait dan sekitar 5.000 orang. Evaluasi pelaksanaan geladi menghasilkan diskusi intens antara pemangku kepentingan pusat mengenai rantai komando dan perlunya izin Bupati sebelum penyebarluasan peringatan dan arahan evakuasi dari PUSDALOPS. Faktanya, otoritas Bantul telah memberikan mandat kepada PUSDALOPS untuk memutuskan perlunya penyebarluasan peringatan dan arahan evakuasi kepada masyarakat. Mandat ini sejalan dengan logika SOP pengambilan keputusan yang menerjemahkan pesan peringatan standar menjadi respon standar di daerah. Prosedur yang telah disetujui oleh otoritas daerah ini menghemat waktu pengambilan keputusan dan memungkinkan penyebarluasan arahan kepada masyarakat dalam waktu singkat.

Di Padang, PUSDALOPS merupakan unit dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang didirikan pada tahun 2009. Gempa bumi 30 September 2009 di Sumatera Barat tidak menimbulkan tsunami, dan NTWC tidak mengeluarkan peringatan tsunami. Namun gempa menyebabkan masyarakat panik dan memicu evakuasi. Gempa ini juga memicu respon dari PUSDALOPS Kota Padang. Sekitar 5 menit setelah gempa, PUSDALOPS menyebarluaskan informasi dari BMKG bahwa tidak ada ancaman tsunami melalui radio VHF. Namun informasi ini tidak sampai kepada masyarakat. Sekitar 20 menit kemudian, Walikota Padang yang menerima informasi dari BMKG melalui SMS mengumumkan melalui RRI. Putusnya sambungan listrik dan telepon karena gempa membuat PUSDALOPS dan Walikota tidak dapat berkomunikasi. PUSDALOPS tidak memiliki peralatan dan mandat untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.



Pembelajaran dari peristiwa ini mendorong perlunya meninjau kembali mandat, SOP, dan sistem penyebaran informasi. Proses ini menghasilkan Peraturan Walikota (Perwako) yang disahkan pada April 2010 yang memberi mandat kepada PUSDALOPS sebagai penyedia layanan peringatan dan arahan evakuasi.

Di Bali, pengembangan sistem peringatan dini dipercepat dengan terbentuknya PUSDALOPS Provinsi pada tahun 2009 yang menjadi prioritas Gubernur Bali yang diatur dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur yang mencantumkan mandat dan tanggung jawab PUSDALOPS dalam peringatan dini tsunami. Otoritas daerah mendelegasikan layanan peringatan kepada PUSDALOPS, artinya PUSDALOPS provinsi yang akan menyebarluaskan peringatan dan arahan evakuasi kepada masyarakat. Meski mungkin tidak sesuai dengan mandat umum Pemerintah Provinsi (Pemprov) namun pengaturan ini telah menyederhanakan rantai peringatan secara signifikan dan lebih menguntungkan masyarakat berisiko. Untuk menjalankan mandatnya, personel PUSDALOPS telah mendapat pelatihan teknologi dan prosedur komunikasi.



Panduan Pelaksanaan Peringatan Dini Tsunami

KESIMPULAN

Dukungan penuh otoritas daerah penting bagi pengoperasian PUSDALOPS. Pendirian PUSDALOPS memerlukan komitmen kesiapsiagaan, struktur lembaga yang mantap dengan mandat yang jelas, bangunan tahan gempa, personel terampil, SOP yang diakui, peralatan komunikasi memadai, dan sistem penyebaran informasi yang andal. Peraturan, perencanaan, dan penganggaran daerah harus sejalan dengan kebutuhan di atas.

Seluruh daerah rawan tsunami di Indonesia perlu mempunyai komitmen dan menyediakan sumber daya untuk mendukung pengoperasian PUSDALOPS. Pengalaman dari daerah percontohan menunjukkan bahwa PUSDALOPS memerlukan masukan intensif untuk memulai (beberapa diantaranya belum berdiri). Layanan peringatan dini tsunami menjadi layak jika menggunakan pendekatan multi-bahaya. Model kerjasama antar wilayah atau dengan provinsi dalam pengoperasian PUSDALOPS perlu ditelaah lebih lanjut.

Peran PUSDALOPS dalam peringatan dini tsunami memang sangat penting. Namun mengandalkan PUSDALOPS sebagai satu-satunya sumber peringatan juga tidak benar, karena akan berbahaya sekali jika PUSDALOPS gagal menjalankan tugasnya. Pemerintah Daerah (Pemda) perlu menghubungkan beberapa entitas lokal ke NTWC. Stasiun radio daerah memainkan peran penting dalam menyampaikan peringatan dari NTWC ke masyarakat. Ini juga mendukung konsep besar sistem yang menjalankan beberapa jalur komunikasi secara bersamaan dengan tujuan utama menyampaikan peringatan dan saran (atau arahan) kepada masyarakat.

Pada akhirnya, sistem peringatan dini membutuhkan kesiapsiagaan masyarakat. Gempa yang dirasakan menjadi saat yang paling tepat untuk menjauhi pesisir. Arahan dari PUSDALOPS menjadi penegasan atau pembatalan respon masyarakat.



Penulis:

Benny Usdianto
benusd@hotmail.com
Michael Hoppe
michael.hoppe@gtz.de
I Gede Sudiarta
i.sudiarta@gtz.de
Willy Wicaksono
willy.wicaksono@gtz.de

Diterbitkan oleh:

Deutsche
Gesellschaft für
Technische
Zusammenarbeit
(GTZ) GmbH

Foto:

© GTZ IS-GITEWS

GTZ Office Jakarta
Menara BCA 46th Floor
Jl. M.H. Thamrin No.1
Jakarta 10310
T: +62-21-2358 7111
F: +62-21-2358 7110
E: gtz-indonesien@gtz.de
I: www.gtz.de/indonesia

Informasi lebih lanjut:

www.gitews.org/tsunami-kit
PUSDALOPS, Kesbanglinmas Kabupaten Bantul,
Dwi Daryanto: pusdalops.bantul@yahoo.com
PUSDALOPS, BPBD Kota Padang,
Drs. Dedi Hendidal : pusdalops.padang@gmail.com
PUSDALOPS, Badan Kesbangpol dan Linmas Prov. Bali,
Ir. I Nyoman S, Mh. : info@pusdalops.baliprov.go.id
GITEWS: www.gitews.org